

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan perkuliahan di sebuah universitas atau kampus, materi yang didapatkan mahasiswa sehari-hari selama di kelas sebagian besar adalah hanyalah teori dan sedikit praktek, baik yang didapatkan dari dosen matakuliah yang bersangkutan maupun dari usaha mahasiswa sendiri. Untuk menerapkan teori-teori dari materi kuliah yang telah didapatkan, dibutuhkan sebuah tempat bagi mahasiswa untuk mempraktikkannya. Salah satu matakuliah yang dikhususnya untuk hal tersebut adalah Kerja Praktek atau Magang. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menerapkan apa yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan atau teori-teori dari matakuliah yang didapatkan sehari-hari di kelas. Karena seperti yang telah diketahui, persaingan dunia kerja sekarang semakin ketat, tuntutan untuk mempunyai kompetensi atau skill yang tinggi, profesionalisme yang tinggi dan pengalaman dalam dunia kerja menjadi kebutuhan yang tentu harus dimiliki.

Dalam Laporan Kerja Praktek akan digambarkan bagaimana keadaan atau situasi selama di tempat kerja praktek, tugas dan kegiatan apa yang dilakukan selama mengikuti kerja praktek, dan tentunya akan dibahas juga mengenai gambaran dari instansi yang bersangkutan, proses bisnis yang berjalan, permasalahan yang terjadi dan solusi-solusi apa yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Desa PDTT memiliki beberapa program, salah satu program yang dimiliki adalah program pengembangan dan peningkatan ekonomi di daerah tertinggal, yaitu dengan memberikan bantuan berupa barang atau jasa kepada pelaku usaha, diantaranya adalah Koperasi.

Koperasi di daerah tertinggal mempunyai kelemahan dan keterbatasan dalam mengelola kegiatan usaha, antara lain dalam menyediakan sarana alat produksi, dan pengembangan usaha, permodalan usaha, akses sumber informasi dan edukasi secara swadaya, tenaga pembina dan pendampingan usaha, sehingga diperlukan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Akan tetapi,

bantuan yang diberikan terkadang tidak memberikan perkembangan dan peningkatan terhadap Koperasi, karena bantuan yang disalurkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan Koperasi.

Kementerian Desa PDTT biasanya sudah menentukan bentuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada daerah tertinggal, Pemerintah Daerah akan mencari Koperasi yang membutuhkan bantuan tersebut dan menyiapkan proposal pengajuan bantuan sosial. Kemudian, dilakukan seleksi terhadap Koperasi tersebut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT. Setelah seleksi dilaksanakan, Pemerintah Daerah akan memberikan proposal pengajuan bantuan sosial tersebut kepada Kementerian Desa PDTT untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian bantuan dikirim dan diserahkan kepada Koperasi.

Namun, jika diamati dan dianalisa bahwa dalam proses bisnis sistem yang berjalan, Kementerian Desa PDTT sudah menentukan bentuk bantuannya, berarti Pemerintah Daerah harus mencari Koperasi yang membutuhkan bentuk bantuan sosial tersebut, dan bantuan yang diajukan Koperasi harus sesuai dengan bentuk bantuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT. Proses penyeleksian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikhawatirkan dapat menimbulkan kecurangan atau penyelewengan, karena tidak ada dokumentasi atau rekapan data, sehingga Kementerian Desa PDTT tidak dapat mengendalikan proses penyeleksian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Monitoring atau pengendalian terhadap bantuan sosial yang telah diberikan juga terkadang Pemerintah Pusat sulit untuk mengetahui perkembangan dari bantuan sosial yang telah diberikan kepada Koperasi di daerah tertinggal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat sebuah judul dalam Laporan Kerja Praktek ini tentang “**Analisis Penerimaan dan Monitoring Kegiatan Bantuan Sosial Koperasi Daerah Tertinggal di Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Sub Direktorat Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan, maka diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses bisnis yang berjalan pada penerimaan dan monitoring bantuan sosial untuk Koperasi daerah tertinggal di Sub Direktorat Koperasi dan UMKM Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ?

2. Apa saja masalah yang terjadi yang menjadi hambatan dalam proses penerimaan dan monitoring bantuan sosial untuk Koperasi daerah tertinggal di Sub Direktorat Koperasi dan UMKM Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ?
3. Apa saja rekomendasi usulan penggunaan sistem informasi atau aplikasi untuk dapat mengatasi masalah pada proses penerimaan dan monitoring bantuan sosial di Sub Direktorat Koperasi dan UMKM Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ?

1.3 Batasan Masalah

Pada Laporan Kerja Praktek ini memberikan batasan hanya akan membahas pada proses penerimaan dan monitoring kegiatan bantuan sosial. Pada analisis masalah hanya akan dibahas berkaitan dengan proses pemberian bantuan sosial berupa barang, proses pengajuan bantuan sosial, penyeleksian terhadap Koperasi, penetapan penerima bantuan sosial dan monitoring untuk mengetahui perkembangan bantuan sosial yang diberikan kepada Koperasi.

Laporan ini tidak akan menganalisis masalah pada proses penyaluran atau pelelangan, pengadaan dan pemeriksaan barang, pengiriman dan penyerahan barang bantuan sosial kepada Koperasi di daerah tertinggal serta hal yang berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial lainnya. Tapi hal tersebut akan dibahas dan digambarkan bagaimana prosesnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan kerja praktek :

1. Memberikan gambaran mengenai tugas dan kegiatan selama di tempat kerja praktek dan gambaran berkaitan dengan instansi yang menjadi tempat kerja praktek.
2. Memahami proses bisnis yang berjalan pada proses penerimaan dan monitoring bantuan sosial terhadap Koperasi daerah tertinggal di Sub Direktorat Koperasi dan UMKM Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Mengetahui apa saja masalah yang menjadi hambatan dalam proses penerimaan dan monitoring bantuan sosial yang dilakukan.
4. Memberikan rekomendasi usulan penggunaan sistem informasi atau aplikasi untuk mengatasi masalah yang menjadi hambatan dalam proses penerimaan dan monitoring bantuan sosial pada Sub Direktorat Koperasi dan UMKM Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan di tempat kerja praktek adalah untuk memberikan gambaran tugas atau kegiatan selama di tempat kerja praktek, gambaran instansi terkait, analisis masalah dan rekomendasi usulan penggunaan sistem informasi atau aplikasi bagi instansi kerja praktek untuk mengatasi permasalahan yang ada.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dibawah ini adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di tempat kerja praktek :

1. Wawancara

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala bagian dan pegawai yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penulisan laporan. Pada pengumpulan data untuk penulisan Laporan Kerja Praktek ini dilakukan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Sub Direktorat Koperasi dan UMKM, dengan Bapak Aminudin Farick selaku Kepala Sub Direktorat Koperasi dan UMKM, Bapak Siswanto selaku Kasi Sub Direktorat Koperasi dan UMKM, Ibu Ike Herdiani selaku Staff Sub Direktorat Koperasi dan UMKM, Ibu Dini, Bapak Reza dan Bapak Selamat selaku Tenaga Pendukung Sub Direktorat Koperasi dan UMKM.

2. Observasi

Data diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Sub Direktorat Koperasi dan UMKM.

3. Tinjauan Pustaka

Metode pengumpulan data yang di dapat dari buku, internet serta bahan-bahan bacaan lain yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hal yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan kerja praktek, manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Judul Laporan Kerja Praktek dan menjadi landasan dalam penelitian dan penulisan.

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan kerja praktek, tugas-tugas yang diberikan selama mengikuti kerja praktek, gambaran umum instansi dan organisasi terkait.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil analisis mengenai proses bisnis yang berjalan, usulan proses bisnis yang baru dan usulan penggunaan sistem informasi atau aplikasi sebagai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yang berkaitan dengan proses Penerimaan dan Monitoring Bantuan Sosial untuk Koperasi daerah tertinggal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran Laporan Kerja Praktek.